

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
Tahun 2026**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim

Program	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan Gas Bumi
Output Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang memuat hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut
Tujuan	Menghimpun data perizinan (KKPRL) yang akurat, menjamin ketertiban administrasi, serta menyediakan basis data terintegrasi guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan inklusif
Analisis Situasi	1. Penataan ruang laut dan perizinan di wilayah pesisir Kalimantan Timur perlu menyesuaikan diri dengan perubahan batas wilayah pasca penetapan IKN. 2. Saat ini, data perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) belum sepenuhnya menyediakan *data pilah gender* terkait siapa saja pelaku usaha atau masyarakat yang terdampak langsung (laki-laki vs perempuan). 3. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam konsultasi publik penataan ruang laut berisiko menyebabkan kebijakan yang diambil kurang merespons kebutuhan spesifik kelompok perempuan, seperti pelaku pengolahan hasil laut atau pedagang skala kecil di pesisir.
Rencana Aksi	1. Melakukan inventarisasi izin (KKPRL) dengan menambahkan variabel *data pilah gender* pemilik usaha/penerima manfaat dalam instrumen pengumpulan data 2. Memastikan keterwakilan perempuan (minimal 30%) dalam forum *Konsultasi Publik* dan *Konsultasi Teknis* penyusunan dokumen. 3. Menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan ruang laut yang mengakomodasi kepentingan kelompok rentan dan perempuan pesisir.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 114.144.000,- (Seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Tersedianya dokumen perencanaan dan data perizinan yang responsif gender guna menjamin keadilan akses informasi dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat pesisir



Kepala,

H. Irhan Hukmaidy, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751228 200003 1 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Issue Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan (Internal)	Sebab Kesenjangan (Eksternal)	Reformasi tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Data dasar perizinan ruang laut saat ini belum membedakan profil pemegang izin atau pemanfaat ruang berdasarkan gender, sehingga distribusi manfaat ekonomi belum terukur secara adil antara laki-laki dan perempuan	Rendahnya partisipasi dan keterwakilan aspirasi perempuan dalam forum teknis penataan ruang laut serta akses informasi perizinan yang masih didominasi kelompok laki-laki	Instrumen pengumpulan dan pengolahan data monitoring belum mewajibkan pencantuman data pilah gender	Hambatan norma sosial dan beban domestik yang membuat perempuan pesisir memiliki keterbatasan waktu untuk menghadiri sesi konsultasi publik	Mewujudkan dokumen monitoring yang inklusif dengan menyediakan database perizinan yang memuat data pilah gender dan rekomendasi kebijakan yang responsif gender	1. Integrasi variabel gender dalam formulir inventarisasi izin. 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan jadwal yang ramah perempuan. 3. Sosialisasi kebijakan ruang laut kepada kelompok perempuan pengolahan ikan	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir sebelumnya belum memiliki analisis dampak gender atau data pilah pelaku usaha	Persentase keterlibatan perempuan dalam konsultasi publik (Target >30%) dan jumlah data izin yang berhasil dipilah berdasarkan gender pelaku usaha



Kepala,

H. Irhan Hukmaidty, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751228 200003 1 002